

Ulama Menyoal Agraria

Persoalan tanah menjadi persoalan yang teramat penting lantaran ia tidak hanya memiliki nilai ekonomis semata. Tetapi lebih dari itu, tanah memiliki nilai budaya, magis, bahkan religius. Begitu pentingnya tanah sehingga tidak jarang pembelaannya harus nyawa. Ini artinya bahwa tanah merupakan bagian yang tidak terpisahkan, terutama bagi masyarakat kita yang mayoritas petani dalam maknanya yang luas. Dengan demikian, pertanian merupakan aktivitas yang dilakoni mayoritas masyarakat Indonesia.

Sayangnya, pertanian menjadi persoalan yang tidak diminati, untuk tidak mengatakan dijauhkan dari kehidupan kita. Negara kita yang pernah menjadi lumbung padi dan sukses dalam swasembada pangan, kini menjadi negara pengimpor beras. Di dalam negeri, harga gabah tidak bisa menutupi biaya produksi pertanian. Akibatnya, bukannya untung, para petani kita menjadi buntung. Itu semua karena kebijakan negara belum menyentuh kepentingan para petani.

Isu inilah yang menjadi tema utama edisi kali ini. Dengan mengusung tema *Gerak Ulama dan Politik Agraria*, edisi ke-24 ini menghadirkan sejumlah perspektif terkait dengan politik agraria. Abd. Mun'im DZ dalam tulisannya, *Ulama Menggerakkan Politik Agraria*, menegaskan bahwa betapa peran ulama dalam mengamankan sektor pertanian dengan belajar kebijaksanaan lokal yang diwariskan secara turun menurun. Menurutnyanya juga, betapa peran kiai dan NU dalam memperjuangkan UUPA, walalupun hingga kini undang-undang itu tidak

kunjung dilaksanakan.

Selain itu, Mochammad Maksud menulis sebuah artikel *Kembali ke Pedesaan dan Pertanian: Landasan Rekonstruksi Perekonomian Nasional*. Tulisan yang bermula dari ceramah guru besarnya ini hendak menegaskan bahwa dalam rangka rekonstruksi perekonomian nasional, kebijakan nasional harus dikembalikan pada pedesaan dan pertanian, bukan malah digadaikan pada pemodal dan pemilik kapital. Apalagi yang dijalankan oleh TNCs. Nada serupa juga dituliskan oleh Henry Saragih dan Witoro. Melalui tulisannya *Petani Melawan Kapitalisasi Bangsa dan Pembaruan Agraria: Pilar Utama Kedaulatan Pangan*, keduanya hendak mengatakan betapa negara memberikan keleluasaan pada pemodal untuk 'membunuh' petani. Munculnya undang-undang penanaman modal dan Perpres 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan untuk Kepentingan Umum merupakan salah satu ironi dari bangsa ini yang kian memperdaya para petani.

Melengkapi edisi ini, redaksi juga menghadirkan wawancara dengan para kiai yang memiliki konsen dalam memperjuangkan hak-hak petani. Mereka itu adalah KH. Imam Churmen, KH. Aziz Asyhuri, dan KH. Abdullah Hasan. Dengan kreativitas dan perannya, mereka berupaya untuk memperjuangkan pada petani dari penindasan para pemodal. Akhirnya, semoga edisi kali ini memberikan perspektif baru bagi pembaca untuk turut ambil bagian dalam memperjuangkan petani di negeri yang mengaku agraris ini. Selamat membaca! [afs] ❖